



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah secara terencana, bertahap, dan terarah, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah secara terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan Program Pembentukan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan tanggal 15 November 2020;

2. Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor 180/10/HUK dan Nomor 170/07.38/DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun 2022 sebanyak 21 (dua puluh sa) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Propemperda Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
1. 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; dan
 2. 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Kota Balikpapan.

- KETIGA : Dalam Propemperda 2022 Kota Balikpapan dapat dimuat Daftar Kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 2. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, DPRD Kota Balikpapan atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
KETUA,



ABDULLOH, S. Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

NO.	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INISIATOR	STATUS			PERANGKAT DAERAH
				BARU	PENYEMPURNAAN	PELAKSANAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	DPRD		√	UU Nomor 26 Tahun 2007	DPPR, DPMPPT
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRD		√	UU Nomor 32 Tahun 2009	DLH
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	DPRD		√	UU Nomor 14 Tahun 2002	BPPDRD
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Izin Penyelenggaraan Reklame	DPRD	√		UU Nomor 28 Tahun 2009	DPMPPT
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	DPRD		√	UU Nomor 28 Tahun 2009	BPPDRD
6	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Prilaku Pelecehan Seksual	Ketahanan Keluarga	DPRD	√		PP Nomor 87 Tahun 2014	DP3AKB
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	DPRD		√	UU Nomor 11 Tahun 2020	DPU
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPRD	√		PP Nomor 122 Tahun 2015	Bag. Perekonomian Setdakot, PDAM
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	DPRD		√	UU Nomor 1 Tahun 2011	Disperkim, DPPR, DLH

10	Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi	Penyelenggaraan Transportasi	PEMERINTAH KOTA	√		UU Nomor 22 Tahun 2009	Dinas Perhubungan
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan	Rencana Pengembangan Industri di Kota Balikpapan	PEMERINTAH KOTA	√		UU Nomor 3 Tahun 2014	DKUMKMP
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Tata Ruang Daerah	PEMERINTAH KOTA	√		UU Nomor 26 Tahun 2007	DPPR
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU Nomor 28 Tahun 2009	BPPDRD
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Retribusi Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU Nomor 28 Tahun 2009	BPPDRD
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMERINTAH KOTA	√		PP Nomor 12 Tahun 2019	BPKD
16	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU Nomor 11 Tahun 2020	BPPDRD
17	Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Cadangan Pangan	PEMERINTAH KOTA	√		PP Nomor 17 Tahun 2015	DP3
18	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	PEMERINTAH KOTA		√	UU Nomor 11 Tahun 2020	DISNAKER
19	Raperda tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	PEMERINTAH KOTA	√		Putusan Pengadilan	DLH
20	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	PEMERINTAH KOTA		√	PP Nomor 40 Tahun 2019	DISDUKCAPIL
21	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	Permendagri No. 99 Tahun 2018	Bag. Organisasi Setdakot

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KETUA.


ABDULLOH